

**DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

**Susana Anita Rosalina Udam
19520008**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Waktu : 11:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji samping I	
3. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji samping II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susana Anita Rosalina Udam

Nomor Induk Mahasiswa : 19520008

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Juni 2023

Yang menyatakan



Susana Anita Rosalina Udam
19520008

MOTTO

“Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat”

Mazmur 10:17

"Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu"

John Ruskin

"Untuk mencapai sesuatu, harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak”

(Mohammad Natsir)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Karya sederhana ini saya persembahkan:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Bapak Agustinus Udam dan Ibu Ester Yaru, terima kasih atas segala doa yang tak pernah henti dipanjatkan, semangat yang selalu diberikan, motivasi serta dorongan, pengorbanan, nasihat, didikan serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 saya dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih Bapak dan Ibu Udam.
2. Kepada saudara saya Didimus Carlos Alfredo Udam dan Immanuel Paskah Anastasius Udam, terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini baik moril maupun materil dan dorongan kepada saya untuk menggapai gelar Sarjana (S1) di kota Yogyakarta.
3. Untuk Dosen Pembimbing saya Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si, terimakasih banyak atas bimbingannya, yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
4. Kepada teman-teman saya yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih kepada Yan Hendrik Wompere, Kak Maemunah, dan Kristina Samca Susi yang telah membantu saya baik saat melaksanakan penelitian serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk Julita, Dewy, Susi, Mia, Iren dan Risna, terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan serta kontribusi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama

menempuh pendidikan sarjana dan terimakasih telah menjadi saudara tak sedarah di tanah rantau.

6. Kepada kawan-kawan anak desa Innocentius Muda, Yan Hendrik Wompere, Klaudius, Marcho Dendo, Maria Oktavia, Anifaturohmi, Petrus Fumuri, dan Nelson Amasndau. Terimakasih atas dukungannya, selalu mendengarkan keluhan saya, memberikan motivasi, selalu memberikan tawa, sedih, suka maupun duka.
7. Untuk teman-teman Bethari Squad yaitu Hitari, Delia, kak Mumun, Rosmulyanti, Arni, Dewy, Susi, Julita, Sisil, dan Inong. Terimakasih atas semangat yang diberikan serta pertanyaan emas yang selalu dilontarkan “sudah sampai mana skripsinya?, sudah bab berapa, kapan Ujian?”. Karena pertanyaan kalian memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di FOKMAPA, KOMAP dan UKM TAEKWONDO terimakasih banyak telah mendidik dan membentuk saya menjadi pribadi yang terampil dan kuat secara fisik maupun mental dan terimakasih atas setiap dukungan dan doanya.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 STPMD “APMD” Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Untuk Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan baik, yang berjudul **“Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul”**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan yang ada. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat

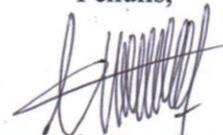
berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Kependidikan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Erman Susilo S.I.P selaku Kepala Desa Karangawen beserta jajaran pamong serta warga masyarakat Karangawen yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan dapat bekerja sama dengan baik, serta memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian Skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun, tentunya akan menjadi pembelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta Juni 2023

Penulis,



Susana Anita Rosalina Udam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Akademik.....	9
2. Manfaat Bagi Pemerintahan Desa	9
F. Literature Review	10
G. Kerangka Konseptual	21
1. Konsep Dinamika.....	21
2. Pelaksanaan Kewenangan Desa	23
3. Konsep Kepemimpinan	25
4. Konsep Kreativitas	26
5. Konsep Partisipasi Masyarakat	28
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30

2. Unit Analisis Data	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Teknik Analisis Data	37

BAB II PROFIL KALURUHAN KARANGAWEN KAPANEWON

GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL..... 40

A. Sejarah Perangkat Kalurahan Karangawen	40
B. Letak Geografis Kalurahan	45
C. Keadaan Demografi.....	47
1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	47
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	49
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan.....	50
D. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	53
E. Potensi Ekonomi	54
F. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	54
1. Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	54
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan	59
4. Sarana Perdagangan	59
G. Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan Karangawen.....	61
1. Visi dan Misi Kalurahan Karangawen	61
2. Pembagian Wilayah Kalurahan.....	65
3. Struktur Organisasi Pemerintah dan Lembaga Kalurahan Karangawen	66

BAB III ANALISIS DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI

KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL..... 76

A. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	77
--	----

B. Kreativitas Perangkat Desa dalam Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.....	94
C. Partisipasi Masyarakat dalam Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	106
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tabel Informan	33
Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....	49
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan.....	50
Tabel II. 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56
Tabel II. 6 Pembagian Wilayah Kalurahan	66
Tabel II. 7 Data Personil Perangkat Kalurahan.....	67
Tabel II. 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.....	73

DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1 Struktur Organisasi Kalurahan Karangawen.....	68
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Administrasi Desa Karangawen Kecamatan Girisubo	46
Gambar II. 2	Sarana Peribadatan Mushola/Masjid di Kalurahan Karangawen ..	55
Gambar II. 3	Sarana Peribadatan Gereja di Kalurahan Karangawen.....	55
Gambar II. 4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA di Padukuhan Pokak	57
Gambar II. 5	TK ABA XXI di Padukuhan Pokak	57
Gambar II. 6	TK ARIWACANA di Padukuhan Kepuh	58
Gambar II. 7	SD BOPKRI di Padukuhan Kepuh.....	58
Gambar II. 8	Warung Sembako di Kalurahan Karangawen	59
Gambar II. 9	Usaha Mebel di Kalurahan Karangawen.....	60

INTISARI

Dalam perjalanannya dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Karangawen berjalan dengan baik, lurah sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam membawa kalurahan untuk mandiri dan sejahtera sama halnya dengan lurah Karangawen. Lurah Karangawen dalam masa jabatannya tidaklah mudah karena kasus korupsi yang menimpa lurah ke 7 kalurahan Karangawen atau lurah sebelumnya berpengaruh terhadap perangkat kalurahan dan juga warga masyarakat. Perangkat desa yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Desa malah cenderung mencampuri urusan dari bidang lain yang bukan merupakan tupoksinya., selain itu kurangnya pemahaman perangkat kalurahan mengenai tugas dan fungsinya masing-masing. Sama halnya dengan perangkat kalurahan Karangawen masyarakat juga enggan untuk terlibat dalam dinamika yang diselenggarakan oleh pemerintah desa karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Dinamika Pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen?

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berfokus pada metode eksploratif untuk memahami objek secara mendalam agar menemukan potensi, masalah, dan hipotesis. Unit analisis penelitian ini yaitu lokasi penelitian di kalurahan Karangawen, objek penelitian ini yaitu dinamika penyelenggaraan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan desa yang terjadi di Kalurahan Karangawen, dan subjek penelitian atau informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Pertama*, Kepemimpinan kepala desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kepemimpinan lurah Karangawen yaitu demokratis dilihat dari kepemimpinan lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan seperti mengadakan musyawarah untuk menggali aspirasi dan menerima masukan dari warga masyarakat serta transparan dan informatif. *Kedua*, Kreativitas perangkat desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintah. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, perangkat kalurahan Karangawen masih mendapatkan kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai tupoksi dari masing-masing bidang serta masalah internal berupa komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat namun adanya persoalan tersebut menjadi batu loncatan bagi perangkat kalurahan untuk meningkatkan kreativitas dalam kinerjanya. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Menurut data observasi peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat di kalurahan Karangawen semakin menurun karena adanya trust issue yang datang dari lurah sebelumnya yaitu bapak Roji Suyanta yang terkena kasus korupsi sehingga masyarakat tidak lagi dapat mempercayai pemerintah desa. Namun dengan adanya pendekatan yang baik antara pemerintah kalurahan Karangawen saat ini partisipasi masyarakat mulai meningkat.

Kata Kunci : Dinamika, Penyelenggaraan pemerintahan, Kepemimpinan Lurah, Kreativitas perangkat kalurahan, dan Partisipasi masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan secara eksplisit bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran tentang desa serta haknya telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, desa membutuhkan pemerintah desa untuk menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan harapan baru bagi masyarakat desa yang dimana dulunya desa hanya dipandang sebagai objek dalam pembangunan dan sekarang dengan kehadiran undang-undang desa kini dipandang sebagai subjek atau pelaku pembangunan itu sendiri, masyarakat diberikan hak atas asal-usul (*rekognisi*) dan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Desa pasal 18 juga telah disebutkan secara eksplisit bahwa , Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kemudian Kewenangan Desa juga meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dilihat walaupun desa sudah diberikan kewenangan, tidak menutup kemungkinan juga bahwa desa masih menjalankan tugas-tugas dari pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bisa jadi bertolak belakang dengan kebutuhan atau kewenangan lokal di desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa atau Lurah yang dibantu oleh perangkat desa. Maka dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas kepala desa maupun perangkat untuk dapat melihat situasi di desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai keunggulan desa dalam mengembangkan desa.

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu desa atau Kalurahan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Karangawen memiliki banyak potensi yang tentunya perlu untuk dikembangkan baik itu potensi ekonomi, sosial, budaya, dan juga keterampilan, potensi sebagai kekuatan desa yang menggambarkan kepribadian desa yang kaya akan potensi yang ada. Untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola setiap potensi yang ada tentu saja

dibutuhkan pemerintah yang ahli dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat desa agar dapat mengelola potensi yang ada secara tepat. Masyarakat di Kalurahan Karangawen mempunyai antusias yang sangat tinggi dalam merespon setiap kebijakan yang ada dan turut bekerja sama dengan pemerintah desa, bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat di Kalurahan Karangawen terbilang sangat baik dengan antusias yang sangat baik, namun pemerintah desa cenderung egois dan mementingkan kepentingan sendiri. Padahal kalau dilihat bahwa masyarakat di Kalurahan Karangawen memiliki jiwa sosial yang tinggi hal ini dapat dilihat dari kerjasama dan juga gotong royong dari masyarakat desa dalam acara-acara seperti melestarikan budaya yang ada di setiap padukuhan, membersihkan desa, kerjasama antar pedukuhan dalam acara kematian, acara-acara keagamaan, dan antusias dalam merespon kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kalurahan. Masyarakat di Kalurahan Karangawen memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, meskipun di Kalurahan Karangawen didominasi oleh kaum muslim namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat desa yang beragama lain dalam menjalankan tugas agamanya. Masyarakat saling menghormati satu sama lain dan masyarakat lumayan terbuka dan bisa diajak kompromi dalam diskusi-diskusi ataupun acara penting lainnya yang diselenggarakan. Namun ada juga masyarakat di Kalurahan Karangawen yang masih belum terbuka dalam artian belum dapat menerima budaya-budaya baru yang mulai berkembang di sekitar lingkungan Kalurahan khususnya bagi para orang tua maupun sepuh di Kalurahan Karangawen.

Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam perjalanannya penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Karangawen berjalan cukup baik, namun setelah beberapa lama mengikuti kegiatan yang ada di Kalurahan Karangawen terdapat beberapa kesalahpahaman berupa komunikasi yang kurang baik, permasalahan ini muncul ketika pembentukan panitia pelaksana kegiatan 17an di kalurahan. Panitia terdiri antara pamong dan mahasiswa kuliah kerja nyata atau (KKN), dimana panitia ini sebelumnya telah dibentuk dan disetujui pada saat rapat bersama Kepala Desa, Perangkat Desa dan mahasiswa. Namun pada prakteknya panitia ini diubah kembali pada saat rapat koordinasi pada pertemuan selanjutnya, hal ini menimbulkan kesalahpahaman karena posisi ketua yang seharusnya diduduki oleh Jayabaya digantikan oleh tata laksana dengan alasannya karena ketua terpilih tidak mengikuti rapat koordinasi sehingga menciptakan kubu-kubu pada perangkat desa. Namun diluar itu semua Lurah Karangawen dalam diskusi non-formal dengan mahasiswa KKN mengatakan bahwa kubu-kubu tersebut sudah ada jauh sebelum masalah ini muncul dan bahkan ada beberapa yang melibatkan keluarga dalam permasalahan ini. sehingga masalah ini tentunya berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, perangkat desa yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Desa malah cenderung mencampuri urusan dari bidang lain yang bukan merupakan tupoksinya dan ada pun perangkat desa yang sulit untuk diajak berkoordinasi karena ego masing-masing. Dalam hal seperti ini kreativitas sangat diperlukan

mengingat kreativitas tidak hanya berbicara pada konteks menciptakan hal baru berupa gagasan dalam bentuk format sebuah karya nyata namun kreativitas akan terjadi apabila dibangun melalui masalah yang memacu.

Berdasarkan masalah tersebut Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa berupaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengumpulkan seluruh pamong dan berdiskusi atau mengungkapkan uneg-uneg dari masing-masing pamong guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun belum dapat dipastikan apakah masalah tersebut benar-benar telah terselesaikan. Perlu adanya ketegasan dalam menyikapi masalah yang ada di pemerintah desa, menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memberikan solusi yang tepat dan merangkul kembali setiap perangkat desa agar dapat bekerja sama. Mengingat penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu saja dimulai dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan pamong.

Sehingga permasalahan yang terjadi di Kalurahan Karangawen penyelenggaraan pemerintahan desa yang seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 6, tertera bahwa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi, penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintahan kalurahan bab V berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pergub ini dituliskan bahwa penyelenggaraan urusan keistimewaan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kelurahan terdiri dari lurah dan pamong kalurahan. Pamong kalurahan sendiri meliputi sekretaris atau carik yang menjalankan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Carik dibantu oleh 3 (tiga) pelaksana urusan yaitu Tata Laksana selaku pelaksana urusan di bidang tata usaha dan umum, Danarta selaku pelaksana urusan di bidang tata keuangan, Pangripta selaku pelaksana urusan di bidang tata perencanaan. Pelaksana teknis atau unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional yaitu, Jagabaya selaku pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari seksi pemerintahan, Ulu-ulu sebagai pelaksana tugas operasional seksi kemakmuran yang merupakan sebutan seksi kesejahteraan dan Kamituwo sebagai pelaksana tugas operasional seksi sosial yang merupakan sebutan dari seksi pelayanan. Dan yang terakhir yaitu Dukuh yang mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari regulasi di atas dapat dilihat bahwa desa serta pemerintah desa yang seharusnya dijalankan seperti apa telah diatur meskipun sangat disayangkan dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturannya, yang tentunya tidak terlepas dari

kelebihan serta kekurangan dari aturan tersebut. Dalam memimpin tentu saja Kepala Desa mempunyai keahlian dalam memimpin dan kapasitas dalam mengatur pemerintahan di desa agar berjalan sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan tugas dan fungsinya. Kepala Desa dalam memimpin memiliki gaya kepemimpinan masing-masing yang memberikan ciri khas dalam menjalankan tugasnya. Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Karangawen mencakup banyak hal, yang akan menjadi titik tekan dari penelitian ini yaitu kepemimpinan, kreativitas serta partisipasi agar lebih terarah.

Dari penjelasan terkait permasalahan yang terjadi di Kalurahan Karangawen maka dalam penelitian ini menggunakan konsep Mazhab Timoho (5G) yaitu *Governance*. Bersumber dari *Panduan Penulisan Karya Ilmiah "APMD" Tahun 2021* konsep *governance* dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang yaitu tata kelola pemerintahan, interaksi pemerintah dengan non pemerintah, tipe-tipe pengelolaan pemerintah dan model *governance* (Anarki, Sentralistik, Desentralistik dan centripetal. Konsep ini memiliki pandangan bahwa pemerintah akan terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, menurut konsep ini juga pemerintah merupakan proses interaksi dan proses konstitutif antara pemerintah dengan masyarakat baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sipil agar tidak terjebak pada pemerintahan sebagai perkantoran. Pemerintah desa dapat menggunakan kekuasaan dan kemampuannya secara bijak untuk mengatur, mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang ada serta merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat

desa. Merangkul masyarakat desa tentunya perlu membangun komunikasi yang baik sehingga pemerintah maupun masyarakat desa terpacu untuk bekerja sama dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Harapannya dengan menggunakan konsep ini mampu untuk menjelaskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Kalurahan Karangawen dan memberikan solusi bagi pemerintah desa untuk lebih berperan aktif dalam melihat masalah yang ada dengan demikian pemerintah desa dapat menjalankan pelaksanaan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan deskripsi dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen?”

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka jangkauan dari penelitian ini perlu ditegaskan sesuai dengan judul yang peneliti ingin berfokus pada :

1. Kepemimpinan kepala desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kreativitas perangkat desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Partisipasi masyarakat dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih ilmiah mengenai dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kepemimpinan, kreativitas dan partisipasi masyarakat, serta dapat memberikan referensi baru penelitian tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dalam ilmu pemerintahan. Selain itu dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan dapat memberikan wawasan baru dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Bagi Pemerintahan Desa

Manfaat bagi pemerintahan desa sebagai tolak ukur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baik sebagai pemimpin atau Lurah

dan juga pamong dalam pelaksanaan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa serta memperhatikan dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

F. Literature Review

Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol 3 No 2*, 215-219.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Persamaan dari penelitian yaitu sebelumnya menegaskan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, sama halnya dengan penelitian ini berkaca dari jurnal di atas gaya kepemimpinan kepala desa akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat, dalam penelitian ini peneliti menggali mengenai dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan bukan hanya kepada kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat saja melainkan kreativitas perangkat kalurahan, adapun lokasi penelitian dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini berbeda yaitu penelitian sebelumnya berlokasi di Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan penelitian ini berlokasi di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

Asrori. (2014). *Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. Jurnal penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri, Vol 6 No 2, 108.* Jurnal ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan

pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Persamaan dari peneliti sebelumnya dan penelitian ini adalah untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa memerlukan perangkat desa yang memiliki keterampilan, kapasitas, dan pengalaman yang memadai. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai kapasitas perangkat desa dapat diukur berdasarkan tingkat pemahaman pada perangkat desa selain itu adapun belum adanya pendidikan dan pelatihan bagi para perangkat desa, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menggali lebih dalam terkait dengan kreativitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020, Desember). *Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa bagi para kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 2, 34-36.* Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik melalui kegiatan dalam pemberian advokasi dan konsultasi di bidang pemerintahan desa umumnya di Kabupaten Garut dan khususnya di Kecamatan Cikajang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk advokasi kepada perangkat pemerintah desa mengenai Sistem Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam mewujudkan

pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kegiatan advokasi ini dapat dikatakan berhasil dengan dihadiri perangkat pemerintah desa di Kecamatan Cikajang. Hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran peserta dan antusiasme peserta selama berjalannya kegiatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah bahwa pembinaan aparatur dapat membantu membuka wawasan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan atau dengan kata lain solusi dari permasalahan pamong yang ada. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang dedikasi kepada warga membantu pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini melihat lebih jauh mengenai dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dari tiga sisi atau fokus yaitu kepemimpinan kepala desa atau lurah, kreativitas perangkat desa dan partisipasi masyarakat.

Liow, M. R., Laloma, A., & Pesoth, W. (2015). *Peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Malola. Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No 31*, 6-8. Jurnal ini membahas tentang Pemimpin informal yang sah bukanlah pemimpin/legalitas dalam Pemerintahan, tetapi para pemimpin informal adalah bagian dari masyarakat desa yang perannya sangat penting dalam memberikan pengaruh kepada warga desa. peran pemimpin informal tidak muncul, hal ini dikarenakan pemimpin formal kepala desa kurang memberdayakan peran kepemimpinan informal. tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemimpin Informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menyintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa adanya penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemimpin informal dalam memajukan masyarakat Partisipasi sangat penting di antara masyarakat, tetapi tidak terlalu efektif dalam hal menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan guna meningkatkan partisipasi Pembangunan masyarakat perlu adanya sinerginitas antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Peneliti berkaca dari penelitian sebelumnya diatas bahwa pemimpin informal dapat menggantikan peran pemimpin formal secara tidak langsung karena pemimpin formal kurang ahli dalam memberdayakan pemimpin informal. Persamaan dari penelitian ini yaitu adanya pemimpin informal namun tidak dapat dirangkul untuk meningkatkan angka partisipasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi walaupun belum sepenuhnya meningkatkan partisipasi namun sedikit membantu, sedangkan penelitian ini mempunyai figur pemimpin informal namun tidak dapat memanfaatkan peluang untuk berkolaborasi antara pemimpin formal dan pemimpin informal.

Muslim, N., & Nasution, I. (2014). *Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan. Jurnal ilmu*

pemerintahan dan sosial politik UMA, Vol 2 No 2, 105. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (2) Kendala dan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (3) Upaya penanggulangan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat desa setempat. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu ditinjau dari proses penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggung jawab belum mampu memberikan pelayanan maksimal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan kinerja pemerintah kalurahan yang kompeten serta bagaimana menghadapi kendala dan upaya penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemerintah desanya saja untuk lebih bekerja sama dan terlibat aktif dan bertanggung jawab sedangkan penelitian ini melihat lebih jauh mengenai dinamika pelaksanaan kewenangan

di bidang penyelenggaraan pemerintahan dari tiga sisi atau fokus yaitu kepemimpinan kepala desa atau lurah, kreativitas perangkat desa dan partisipasi masyarakat.

Sajangbati, Y. C. (2015, April). *Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jurnal elektronik bagian hukum administrasi negara fakultas hukum Unsrat, Vol 3 No 2, 27.* Jurnal ini membahas tentang Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencerminkan otonomi asli desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh seretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat. Walaupun pada dasarnya tidak ada yang namanya otonomi desa namun dalam jurnal ini spesifik menjelaskan bahwa desa harus mandiri sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang desa. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan sedangkan perbedaannya yaitu dalam sudut pandang dari peneliti sebelumnya yang melihat tentang pemerintah serta badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugasnya khusus dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan

penelitian ini ini melihat lebih jauh mengenai dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dari tiga sisi atau fokus yaitu kepemimpinan kepala desa atau lurah, kreativitas perangkat desa dan partisipasi masyarakat.

Semaun, F. (2019). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 4, No 1, 28. Jurnal ini membahas tentang bagaimana seorang kepala desa dapat menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan norma pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti yang telah tercantum dalam Ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang susunan organisasi pemerintahan desa menetapkan tugas dan kewajiban kepala desa. Hasil yang diperoleh dari jurnal ini yaitu peneliti menemukan bahwa pelaksanaan tugas tersebut masih mengalami kendala karena kurang ditunjang sumber daya aparatur desa. Kurangnya disiplin sekretaris desa, sehingga penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sedianya secara bersama Perangkat Desa, tetapi kenyataannya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa. Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa sudah berusaha menuntun dan membina perangkat desa di bawahnya secara bijaksana selaku seorang pemimpin. Persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyelenggaraan pemerintah desa serta menyoroti kepala desa sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak perangkat desa yang membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada pemerintah desanya saja

sedangkan penelitian ini melihat dari tiga sisi yaitu kepemimpinan kepala desa, kreativitas perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat desa.

Sumeru, A. (2016). *Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jurnal kebijakan dan manajemen publik, Vol 4 No 1, 53-54.* Jurnal ini dibuat berdasarkan studi yang dilakukan untuk mengetahui serta akibat hukum dari seorang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan desa. Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang artinya menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma dan aturan-aturan yang dibahas yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jurnal ini juga menjelaskan dari studi pustakanya untuk memperlihatkan bahwa adanya pejabat kepala desa bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peneliti menggunakan jurnal di atas sebagai acuan bahwa seorang pemimpin perlu untuk menggunakan otoritasnya secara bijak dalam pemerintahan desa. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan perundang-undangan maupun aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai setiap keputusan yang diambil oleh kades memiliki konsekuensinya sehingga kepala desa menjadi orang yang paling disoroti dalam penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian ini melihat

dari tiga sisi yaitu kepemimpinan kepala desa, kreativitas perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat desa.

Sundariani, N. P., & Yasa, I. G. (2022, Desember). *Pengaruh potensi desa, lokasi desa, kreativitas kepala desa dan partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 2 No 12, 1468-1478. Melalui jurnal ini peneliti menyampaikan bahwa untuk menganalisis dampak potensi desa, lokasi desa, kreatifitas kepala desa menjadi sejahtera karena keikutsertaan masyarakat dalam angkatan kerja di Kabupaten Buleleng, Yang akan peneliti soroti dalam penelitian ini adalah analisis tentang kreativitas kepala desa yang ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Buleleng. Dijelaskan bahwa kreativitas kepala desa yang baik mengenai penguatan kemitraan bumdes dengan lembaga keuangan, pengembangan *one village one product*, serta partisipasi yang berasal dari masyarakat dan lembaga keswadayaan masyarakat desa seperti PKK, karang taruna, dan lembaga lainnya. Sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja telah tercatat beberapa pemerintah desa memiliki kepala desa dengan inovasi dan daya kreativitas yang tinggi seperti Desa Tembok, Desa Tajun yang telah mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja guna mendorong kemajuan perekonomian desa. Dari review di atas peneliti menegaskan bahwa kreativitas kepala desa sangat dibutuhkan untuk mengembangkan partisipasi dari masyarakat untuk membangun desa dan meningkatkan kerjasama yang intens dan baik antar lembaga yang ada dalam

masyarakat desa. Persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kepala desa atau pemimpin dan juga partisipasi dari masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi namun merujuk kepada angka kerja atau kesejahteraan masyarakat desa sedangkan penelitian ini melihat dari tiga sisi yaitu kepemimpinan kepala desa, kreativitas perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat desa seperti partisipasi sosial dan politik.

Yunanto, S. E. (2021). Governabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Volume 2 Nomor 1 Juni 2021*, 15-17. Dalam jurnal ini membahas tentang Mazhab Timoho. Mazhab ini berbicara mengenai penyusunan kembali ilmu pemerintahan, dengan berorientasi pada pembentukan pemerintah (*government making*). *Pertama*, secara idealis-aksiologis, *government making* berpondasikan ideologis-filosofis pada kerakyatan yang tujuannya untuk mencapai keadilan. *Kedua*, yaitu bagaimana pemerintah dan parlemen melakukan perbuatan secara politik dan hukum dengan konstitusi, legislasi, dan regulasi, semata bukan untuk *ordering the kingdom* semata tetapi untuk membuat perubahan negara (*changing the state*), yang memberi kontribusi terhadap kemajuan dari rakyat menjadi warga. *Ketiga*, GM merupakan tubuh pengetahuan ilmu pemerintahan yang berpondasi suatu ilmu, sanggup membuat teori-teori pemerintah (an), serta menggunakan berbagai perspektif pemerintahan untuk mengamati, memahami, dan menjelaskan fenomena hajat hidup orang banyak di luar ranah perkantoran. *Keempat*, *authorities making* membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik yang berbicara *kingdom*

making dan administrasi publik yang berbicara *policy making*. Jaringan pemerintah dan negara merupakan pintu masuk bagi ilmu pemerintahan. Kelima, tubuh pengetahuan ilmu pemerintahan dapat dibentuk dan diperkaya dengan lima konsep besar: *government, governing, governability, governance, dan governmentality*. Dari jurnal ini peneliti dapat menggunakan konsep atau cara pandang baru dalam pemecahan masalah yang efektif untuk digunakan saat ini. dalam penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama menggunakan konsep mazhab timoho dalam melihat permasalahan yang ada di desa, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan atau menjelaskan mengenai kelima isi dari mazhab timoho itu sendiri sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu konsep yang digunakan untuk sebagai kaca mata untuk melihat permasalahan yang ada di kalurahan Karangawen.

G. Kerangka Konseptual

1. Konsep Dinamika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinamika adalah gerakan dari dalam tenaga yang menggerakkan atau semangat. Dinamika ialah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok orang secara terus-menerus dan hasilnya merubah tata hidup masyarakat yang saling berkaitan. Istilah dinamika juga kerap digunakan dalam beberapa bidang seperti sosial, ekonomi, hingga politik.

Kata dinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu “dynamics” yang berarti kekuatan. Dinamika ialah tingkah laku masyarakat yang secara langsung mempengaruhi masyarakat atau kelompok lainnya secara timbal

balik, Yang dimana dinamika menandakan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara holistik.

Menurut Slamet Santosa (2004:5), dinamika berarti tingkah laku masyarakat yang satu secara spontan mempengaruhi masyarakat yang lain secara timbal balik. Dinamika diartikan sebagai adanya interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan.

berdasarkan pengertian di atas maka kesimpulannya dinamika adalah adanya interaksi ataupun hubungan timbal balik antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lainnya yang dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Munir, dinamika ialah sistem ikatan timbal balik yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Sedangkan menurut Johnson (2012:20) mengartikan dinamika kelompok sebagai sebuah lingkup pengetahuan sosial yang berfokus pada pengetahuan mengenai hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok ialah studi ilmu tentang perilaku dalam kelompok untuk meningkatkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian di atas, dinamika merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan ataupun mempengaruhi antara unsur yang satu terhadap unsur yang lain, baik individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok. Sehingga terciptanya sebuah perubahan. Dalam konsep ini peneliti akan menekankan pada dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan Kewenangan Desa

Kewenangan ialah hal penting yang menjadi hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pada konsep pemerintahan demokrasi, kewenangan tidak hanya dimiliki oleh penguasa saja tetapi juga oleh siapa yang akan dipilih dan siapa yang akan menjalankan perintah dan kewenangan yang akan terlibat apakah dapat diterima dan dijalankan atau malah sebaliknya.

Wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum, jadi dalam konsep hukum secara umum, wewenang akan selalu disambungkan dengan kekuasaan. Selain itu F.P.C.L Tonnaer sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan HR berpendapat kewenangan dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat membuat hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pada pasal 2 berbicara tentang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang dimuat pada pasal 1 tentang Kewenangan lokal berskala desa meliputi

beberapa bidang seperti urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa, urusan kemasyarakatan desa, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa. Secara khusus urusan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut yaitu penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana prasarana kantor desa dan, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Peraturan di atas jelas menyatakan bahwa kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berbasis pada kelokalan desa, desa mempunyai hak untuk melakukan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhannya. Artinya dapat dilihat bahwa kewenangan lokal berbasis desa merupakan sebuah hak yang muncul dari gagasan masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Yang dimana kewenangan tersebut harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat diterima dan dijalankan, akan tetapi hanya saja kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung mencakup hal-hal yang relatif kecil dalam skala desa.

Jenis kewenangan lokal berbasis desa merupakan bawaan dari konsep subsidiaritas, maka persoalan atau urusan berbasis lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebisa mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh pemerintah desa. Dimana menurut konsep subsidiaritas hal-hal yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

3. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” atau dalam bahasa Inggris disebut “lead” berarti bimbing dan tuntun, dengan demikian didalamnya terdapat dua pihak yaitu pihak yang memimpin atau imam dan yang dipimpin atau umat. Dari kata pimpin kemudian ditambah dengan awalan “pe” menjadi “pemimpin” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris disebut sebagai “leader” berarti orang yang mampu mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain dapat bertindak dalam mencapai tujuan tertentu. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pemimpin” yang artinya orang yang memimpin atau mengepalai, pemimpin dengan pimpinan adalah dua hal yang berbeda, pimpinan atau kepala lebih otokratis, sedangkan pemimpin atau ketua lebih demokratis. Setelah ditambah dengan awalan “ke” maka akan menjadi “kepemimpinan” jika diterjemahkan ke bahasa Inggris “leadership” yang artinya keahlian seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama, sehingga pelaku-pelaku tersebut menjadi struktur dan ini dari proses kelompok (Syafiie, M.Si., 2014).

Terbentuknya Pemimpin, Selain dipandang sebagai proses dan kemampuan, (Kartono, 2009) membagi terbentuknya pemimpin dapat dibedakan menjadi 3 yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. *Pertama*, teori genetis dapat bermakna *given* atau bawaan, berarti pemimpin

sudah ada bakat sejak lahir, tidak dapat dibuat dan terjadi secara alamiah yang dimiliki oleh individu tertentu dan tidak semua orang memilikinya. *Kedua*, teori sosial dapat bermakna *skills*, bahwa pemimpin tidak dilahirkan katakana tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan dididik, dan dibentuk. Kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain dapat didesain, dilatih, dan bersifat buatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai lembaga atau organisasi yang mengadakan pelatihan kepemimpinan. Namun adanya kegiatan tersebut belum menjamin seseorang untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. *Ketiga*, teori ekologis, bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat pemimpin. Kemudian bakat ini dikembangkan melalui pendidikan dorongan dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. (Syafiie, M.Si., 2014)

Berdasarkan pengertian diatas kepemimpinan adalah suatu cara atau pun kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain. Yang dimana cara mempengaruhi orang lain dapat didesain, dilatih, dan bersifat buatan. Konsep ini digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana kepemimpinan seorang kepala desa di Kalurahan Karangawen dalam dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Konsep Kreativitas

Menurut KBBI makna dari kreativitas adalah kemampuan untuk membuat atau suatu daya cipta. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai

kreasi terbaru dan masih orisinal yang tercipta. Kreativitas ialah sebuah proses mental yang menarik untuk menghasilkan hal baru, bertolak belakang dan orisinal. Baik dalam format gagasan maupun dalam format sebuah karya nyata. Jika kreativitas ini bersangkutan dengan suatu karya maka dapat menjadi penghubung antara karya yang telah lama diciptakan dengan karya yang baru dibuat. Pada dasarnya setiap orang mempunyai tingkat kreativitasnya masing-masing (Asfihan, 2022).

Menurut Havvel berasumsi bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk bisa membuat suatu komposisi ataupun sistem yang baru. Sedangkan menurut Semiawan Lalu, kreativitas ialah keterampilan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan melakukannya sebagai solusi masalah. Kreativitas mencakup ciri-ciri aptitude laksana kelancaran (*fluency*), keluwesan (*flexibility*) dan kemurnian (*originality*) dalam pemikiran, maupun ciri-ciri non aptitude, laksana rasa hendak tahu, senang mengemukakan pertanyaan dan selalu hendak mencari pengalaman-pengalaman baru.(Asfihan, 2022)

Perilaku kreativitas terjadi atau muncul melalui persoalan atau masalah yang mengacu pada lima macam perilaku, sebagaimana yang dipaparkan oleh Parnes (dalam Nursito: 2000) sebagai berikut :

- a. *Fluency* (Kelancaran), adalah keterampilan yang mengemukakan gagasan serupa untuk memecahkan sebuah masalah.
- b. *Flexibility* (Keluwesan), adalah keterampilan untuk menghasilkan respon yang menarik ataupun luar biasa.

- c. *Originality* (Keaslian), adalah keterampilan memberikan respon yang menarik ataupun luar biasa.
- d. *Elaboration* (Keterperincian), adalah keahlian untuk menyatakan pengarahannya secara rinci guna mewujudkan gagasan menjadi kenyataan.
- e. *Sensitivity* (Kepekaan), adalah kepedulian untuk menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.

Berdasarkan pengertian di atas kreativitas yaitu kemampuan untuk membuat daya cipta yang mampu menghasilkan sesuatu yang baru, baik dalam format gagasan maupun dalam format sebuah karya nyata. Yang dimana kreativitas mencakup kelancaran, keluwesan, keaslian, keterperincian dan kepekaan. Konsep ini digunakan oleh peneliti untuk melihat masalah yang terjadi pada perangkat desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa di Kalurahan Karangawen.

5. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (2003:8) mengemukakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi pertama apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

- a. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berpatokan pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam

lembaga pemerintah dari pada partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan sendiri.

- b. Partisipasi social (*social participation*) partisipasi diletakan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dibuat untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keikutsertaan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai tempat pembelajaran dan mobilisasi sosial.
- c. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada keikutsertaan langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga sudah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima bantuan atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berfokus pada agenda penentuan kebijakan publik.

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan warga atau masyarakat dalam pengambilan

keputusan, serta partisipasi sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dalam konteks ini peneliti menggunakan konsep di atas dengan fokus dari permasalahan yang diteliti yaitu Partisipasi masyarakat dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dimana masyarakat sendiri bukanlah objek semata dalam pembangunan melainkan subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri sehingga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan sangat diperlukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memilih strategi studi eksploratif sebagai metode kajiannya. Studi eksploratif merupakan studi dengan penelusuran, terutama dalam pemetan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dilihat dari tujuannya, studi eksploratif bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. (Yusuf, 2017)

Karakteristik penelitian studi eksploratif sebagaimana dinyatakan oleh (Yusuf, 2017) dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, penelitian eksploratif ingin menemukan sesuatu apa adanya sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan suatu fenomena tersebut secara lebih jelas dan tuntas. *Kedua*, menggunakan informan kunci. *Ketiga*, instrumen yang dipakai haruslah mampu mengungkapkan sebanyak mungkin informasi

yang dibutuhkan sesuai dengan objek penelitian. *Keempat*, bentuk pertanyaan yang dipakai lebih banyak yang bersifat terbuka dari pada yang bersifat terstruktur, sehingga mampu menampung atau mendeteksi sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan. *Kelima*, menggunakan data primer dan data sekunder karena kedua jenis data tersebut akan saling melengkapi.

Kajian ini menempatkan jenis studi eksploratif yang diorientasikan untuk menggali secara luas tentang kondisi di Desa Karangawen terutama mengenai kepemimpinan kepala desa dan bagaimana perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan metode pendekatan studi eksploratif, penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berfokus pada metode eksploratif untuk memahami objek secara mendalam agar menemukan potensi, masalah, dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggali tentang bagaimana dinamika penyelenggaraan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan desa yang terjadi di Kalurahan Karangawen yang difokuskan pada tiga unsur yang akan diteliti yaitu kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa. Dengan demikian penelitian ini akan lebih fleksibel dan sangat efektif untuk penelitian.

2. Unit Analisis Data

Menurut Suprayogo, dkk (2001:48), unit analisis ialah suatu yang berkaitan dengan focus atau hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan unit analisis untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinamika Penyelenggaran Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang merespon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jadi bisa disimpulkan bahwa subjek penelitian ialah sumber data ataupun pihak yang mengenali tentang data dari penelitian yang dilakukan. Serta dalam penelitian ini, pemilihan informan ditetapkan dengan memakai metode *purposive*, dimana penentuan subjek penelitian dilakukan oleh peneliti dengan memilih informan yang dikira mengetahui serta sanggup dan bisa dipercaya untuk dijadikan informan berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini.

Berikut ini adalah data informan yang peneliti temukan dalam melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi

terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci deskripsi informannya sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini :

Tabel I. 1
Tabel Informan

No.	Nama	Umur	Jabatan/Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Erman Susilo S.IP	40th	Lurah Karangawen	S1	Laki-laki
2.	Hendhie Andreas Toyo	36th	Carik	SLTA	Laki-laki
3.	Dwi Ristyanti	39th	Ketua PKK	S1	Perempuan
4.	Supiran	60th	Dukuh Pokak	SLTA	Laki-laki
5.	Saryanto	52th	Dukuh Kepuh	SLTA	Laki-laki
6.	Sigit Utomo Putro	42th	Anggota BPD	SLTA	Laki-laki
7.	Wurry Kristyanti	39th	Masyarakat	S1	Perempuan
8.	Dayat	35th	Masyarakat	SLTA	Laki-laki

Sumber: Data Primer 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Ada banyak alasan yang baik untuk menggunakan teknik observasi dalam penelitian misalnya teknik ini dibangun atas pengalaman langsung atau *direct experience*. Observasi sebagai teknik tidak diragukan lagi memberikan rentangan yang paling luas tentang input data yang dapat diinterpretasikan oleh peneliti yang sedang menggunakan basis pengetahuan yang tidak terucapkan.

(Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu faktor mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi itu sendiri data itu kemudian dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil seperti proton dan elektron maupun yang sangat jauh benda ruang angkasa dapat diobservasi dengan jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang dan tersamar. Sugiyono juga menjelaskan bahwa penelitian dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian tetapi dalam suatu saat penelitian juga tidak dapat terang atau tersamar dalam observasi hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi tersebut.

Menggunakan teknik observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara turun ke Kalurahan Karangawen dan mencatat setiap kegiatan yang ada di lokasi seperti kegiatan musyawarah desa selain itu data hasil wawancara yang didapat dari informan yang telah diolah menjadi basis data yang akan dianalisis, hal-hal yang diobservasi dan dianalisis yaitu tentang dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang disorot daritiga sisi seperti kepemimpinan lurah Karangawen, kreativitas

perangkat Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tingkat partisipasi dari warga masyarakat Karangawen.

b. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2018:114) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengimplementasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal tersebut tidak ditemukan melalui observasi.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti selama berada di lokasi yaitu wawancara mendalam, dalam proses wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung atau *face to face* agar setiap informasi yang diperoleh peneliti lebih rinci dan maksimal peneliti menggunakan perekam audio untuk merekam setiap percakapan antara peneliti dan informan. Informasi yang telah didapat kemudian akan di rangkum dan ditulis dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Segiono (2018:124) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Yang

mana dokumentasi ini mendukung hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar seperti: *Pertama*, Profil Kalurahan Karangawen dalam profil kalurahan berisi tentang informasi desa yaitu gambaran umum Kalurahan Karangawen, pemerintahan dan lembaga yang ada di Kalurahan Karangawen, kondisi wilayah, sarana prasarana dan infrastruktur, sosial budaya masyarakat, ekonomi kalurahan dan potensi kalurahan. *Kedua*, sejarah perangkat kalurahan, kalurahan karangawen merupakan alurahan yang belum memiliki sejarah kalurahan sehingga data yang tersedia berupa data mengenai struktur pemerintah desa mulai dari kepala desa atau lurah pertama sampai lurah saat ini diikuti oleh perangkat kalurahan. *Ketiga*, Peraturan Lurah Karangawen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Keempat Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. *Kelima*, APBKal atau anggaran pendapatan dan belanja kalurahan yang berbasis pada SISKEUDES atau sistem keuangan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, sumber dana dan rencana anggaran biaya (RAB). Sumber dananya antara lain dari Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD, Dana Desa (DDS) bersumber dari APBN, Pendapatan Lain Lain (DLL), Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH), Penerimaan Bantuan Kabupaten atau Kota (PBK),

Penerimaan Bantuan Provinsi atau Kementerian atau Lembaga (PBP). Keenam dokumen lainnya yaitu gambar wawancara dengan para informan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2014)

Proses analisis informasi yang dicoba riset ini memakai 3 langkah ialah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai kepemimpinan kepala desa Karangawen dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah, aktivitas pemerintah, dan kreatifitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2016) dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative trsearch data in the past has ben narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalm penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2016).

Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat perkembangan desa karangawen di tangan pemimpin sebelumnya dan pemimpin yang sekarang serta strategi seperti apa yang perlu untuk digunakan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

BAB II

PROFIL KALURUHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGGIDUL

A. Sejarah Perangkat Kalurahan Karangawen

Kepala Desa pertama adalah Ki Pali Iro Rejo yang menjabat selama 76 tahun beliau menjabat mulai dari tahun 1867-1943, sedangkan pusat pemerintahan desa bertempat di rumah Ki Iro Dimedjo, pada masa itu sudah ada perangkat desa yang membantu pemerintahan di Desa Karangawen, diantaranya Ki Karni yang merupakan carik yang menjabat dari tahun 1867-1948 setelah itu beliau digantikan oleh Sastro Sularso yang menjabat dari tahun 1948-1968. Ki Wiryo Disastro sebagai Kamituwa yang dibantu oleh Mudin yaitu Ki Kasan Muktar.

Kepala Desa kedua adalah Ki Warga Sastra yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Desa selama 20 tahun mulai dari tahun 1948-1968, yang mana pada saat itu negara Indonesia telah terbebas dari penjajah. Pusat pemerintahan saat ini bertempat di rumah Ki Warga Sastro, perangkat desa yang lama pun diganti dan dibentuklah susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yaitu Lurah yang dibantu oleh 12 perangkat kalurahan antara lain: Carik, Keamanan, Sosial, Kemakmuran, Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik. Setelah Ki Warga Sastra meninggal dunia dikarenakan usia beliau yang semakin tua, setelah itu jabatan Lurah diteruskan oleh bapak Sosial

yaitu Ponco Sutoyo yang menjabat dari tahun 1968-1972 dikarenakan jabatan kepala desa belum diduduki atau dijabati secara definitif.

Pada tahun 1972 diadakan pemilihan Lurah secara langsung dan terdapat dua calon Lurah yang pertama yaitu Bapak Ponco Sutoyo dan Bapak Atmo Sentono, setelah melakukan pemilihan langsung Lurah terpilih yaitu Bapak Ponco Sutoyo. Saat itu sudah ada lembaga desa yang mendukung pemerintahan ada DPR KGR, WANRA, KAMRA, LSD. Selain itu adat-adat yang masih berlangsung antara lain bersih desa, bersih telaga, silaturahmi, dan mengirim doa.

Kepala Desa ketiga adalah Ponco Sutoyo yang menjabat dari tahun 1972-1984, Jogo Sudiro menjabat sebagai carik dari tahun 1973-1998, Hadi Pranoto menjabat sebagai keamanan dari tahun 1968-1996 dan digantikan oleh Jumadi sampai tahun 1999, Wagiyu Winoto menjabat sebagai sosial dari tahun 1977-2000, Wignya Sujono menjabat sebagai kemakmuran dari tahun 1960-1969 dan dilanjutkan oleh Suparno dari tahun 1970-1999, Muhadi Ramlan menjabat sebagai bagian agama dari tahun 1973-1988, Ngatiran menjabat sebagai kaur umum dari tahun 1977-2010, Martoyo menjabat sebagai staf keamanan dari tahun 1977-1998, Wakiman menjabat sebagai staf sosial dari tahun 1977-1992, Purwo Wiharjo menjabat sebagai staf umum dari tahun 1977-1983, Sungkono menjabat sebagai staf kemakmuran dari tahun 1977-2017, Purwo Suwito menjabat sebagai staf desa dari tahun 1973-1997, Atmo Suwitu Dukuh Bandung dari tahun 1968-1982, Dirjo Ratmono Dukuh Tlasih dari tahun 1974-1997, Paliyo Dukuh Langsep dari tahun 1990-2016, Atmo Sentono Dukuh

Pokak dari tahun 1968-1980, diikuti oleh Parmo Suwito dari tahun 1980-1994, Narto Rejo Dukuh Tegalrejo dari tahun 1977-1997, Wardo Suwito Dukuh Nganglik dari tahun 1977-1996, Tuginin Dukuh Karangawen dari tahun 1982-1989. Punjering adalah balai desa yang dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1974 yang terletak di Padukuhan Kepuh, lokasi kas desa. Pada era itu adalah era orde baru, lembaga desa adalah LSD, LMD, LKMD, PKK, Kelompok Tani. Saat itu sudah ada bibit pantun varietas unggul tahan serangga (VUTW) IR 36 dari penyuluhan pertanian Santoso dan Sariman. Warga selalu bergotong-royong membangun desa dengan membuat jalan lingkungan di dalam wilayah desa, terdapat dua SD yaitu SD Bopkri dan SD Negeri/Impres, Program IDI, tempat olahraga, membangun danau Puen, dan lain-lain.

Kepala Desa keempat adalah Jumadi yang menjabat dari tahun 1985-1995, yang dibantu oleh 14 perangkat dan 5 staff yaitu Sekretaris Desa, Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, , Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Nganglik, Staf Pemerintahan, Staf Umum, Staf Keuangan, Staf Kesra, Staf Pembangunan. Dan Tukang kebun yaitu Wasito. Desa juga bekerjasama dengan Lembaga Desa BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna.

Kepala Desa kelima adalah Salimin yang menjabat dari tahun 1996-2004, dibantu oleh 14 perangkat, 5 staff dan 1 tukang kebon antara lain : Sekretaris Desa, Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Kesra,

Kaur Keuangan, Kaur Umum, Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik, Staf Pemerintahan, Staf Umum, Staf Keuangan, Staf Kesra, Staf Pembangunan. Dan Tukang kebun yaitu Wasito. Desa bekerjasama dengan lembaga desa seperti BPD, RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna. Seiring dengan berjalannya waktu perubahan peraturan dari pemerintah daerah pada tahun 2002 terdapat peraturan baru untuk menambahkan perangkat desa yaitu sekretaris BPD yang mengemban dan membantu tugas BPD dalam bekerja dan posisi ini dijabat oleh Sudiro dari tahun 2002-2008.

Kepala Desa keenam adalah Ngatiran yang menjabat dari tahun 2004-2014 dibantu oleh 15 perangkat/pamong, 5 staf dan 1 tukang kebon dengan rincian yaitu : Sekretaris Desa, Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik, Staf Pemerintahan, Staf Umum, Staf Keuangan, Staf Kesra, Staf Pembangunan. Dan Tukang kebun yaitu Wasito. Bekerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat desa yang diharuskan untuk pertama kali disebut lembaga pemerintah desa atau BPD dan organisasi masyarakat desa lainnya seperti, LPMD, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.

Kepala Desa ketujuh adalah Roji Suyanta yang menjabat dari tahun 2015-2021 yang dibantu oleh 15 perangkat/pamong, 5 staf, dan 1 tukang kebon sebagai berikut : Sekretaris Desa, Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan,

Kabag Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, , Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik, Staf Pemerintahan, Staf Umum, Staf Keuangan, Staf Kesra, Staf Pembangunan. Dan Tukang kebun yaitu Wasito. Desa bekerjasama dengan lembaga yang ada di desa yang pertama yaitu BPD dan yang kedua yaitu lembaga masyarakat desa seperti, LPMD, RT/RW, PKK dan Karang Taruna.

Kepala Desa kedelapan adalah Erman Susilo, S.IP yang menjabat dari tahun 2021-2027, dibantu oleh 15 perangkat/pamong 5 staf dan 1 tukang kebon sebagai berikut : Crik, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, Danarta, Tatalaksana, Pangripta, Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Pokak, Duluh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik, Staf, tukang kebon. Bekerja sama dengan lembaga Kalurahan yaitu lembaga masyarakat Bamuskal dan lembaga lainnya seperti LPMK,RT/RW, PKK, dan Karang Taruna. Dengan bantuan dari masyarakat bersama-sama bergabung untuk mendukung visi-misi yang ingin dicapai dengan belajar dari masa lalu.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan Lurah Karangawen yang sekarang (Bapak Erman Susilo S.IP) menyatakan bahwa Kalurahan Karangawen merupakan salah satu Kalurahan yang belum tahu hari jadinya secara spesifik sehingga Lurah Karangawen mengadakan kerjasama dengan beberapa dosen dari kampus STPMD “APMD” dalam bulan ini (Maret 2023) untuk menelusuri sejarah Karangawen sehingga dapat disusun kembali mulai dari adat istiadat, cerita-cerita yang ada di

masyarakat dan seni yang dimiliki oleh Kalurahan Karangawen, sehingga dapat menjadi sejarah Karangawen agar ke depannya Kalurahan Karangawen tidak kehilangan sejarahnya. Selain itu karena Kalurahan Karangawen ingin berkembang menjadi desa budaya maka sejarah kalurahan menjadi komponen penting untuk mendukung Karangawen menjadi Desa Budaya.

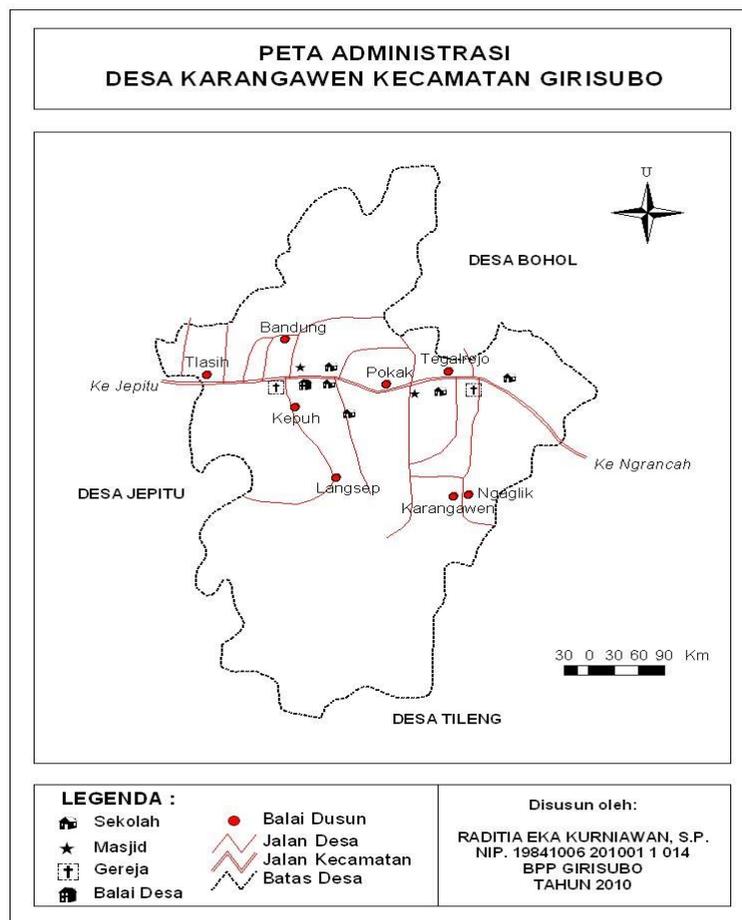
B. Letak Geografis Kalurahan

Karangawen merupakan salah satu kelurahan dari 144 (seratus empat puluh empat) kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Dimana kalurahan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kelurahan Karangawen sendiri terletak di barat pemerintahan Kapanewon Girisubo. Dan Kalurahan Karangawen terletak di sebelah tenggara Wonosari (pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul). Jarak Kalurahan dari Kota Wonosari sejauh 38 km dari titik 0 Wonosari. Berdasarkan letaknya Kalurahan Karangawen termasuk di bagian zona selatan yang disebut kawasan gunung sewu yang berada di ketinggian 0 m-300 m mdpl. Kalurahan Karangawen sampai saat ini belum ada sumber air yang dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat saat musim kemarau dalam waktu satu tahun saja hujan hanya terjadi selama 89 hari yang dihitung dari 360 hari dalam 1 tahun. Dengan curah hujan 1382 mm dengan suhu tertinggi 35 derajat celcius, dan suhu terendah 25 derajat celcius.

Secara administratif Kalurahan Karangawen berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yakni:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu kapanewon Girisubo.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo.
4. Sebelah barat Berbatasan dengan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo.

Gambar II. 1 Administrasi Desa Karangawen Kecamatan Girisubo



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Sebagai Kalurahan, Karangawen mempunyai luas sekitar 6.252.537 Ha dan dibagi menjadi beberapa padukuhan yaitu Telasih, Bandung, Kepuh, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen, dan Ngaglik

C. Keadaan Demografi

Data demografi pada sebuah Kalurahan sangatlah penting bagi pemerintah desa, karena dengan data secara tidak langsung pemerintah desa bisa mengetahui dan memantau keadaan masyarakat dengan data yang telah tersedia. Dimana analisis kependudukan dapat merujuk pada seluruh masyarakat secara keseluruhan maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti jenis kelamin, jumlah kepala keluarga, agama, usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan jumlah pengangguran di Kalurahan tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (Profil Kalurahan Karangawen 2023). jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sebanyak 1633 jiwa dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin seperti pada tabel berikut.

Tabel II. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentas (%)
1.	Laki-laki	800 jiwa	48,98
2.	Perempuan	833 jiwa	51,01
Total		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel II.1 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Karangawen lebih didominasi oleh perempuan yakni sebesar 51,01% dibandingkan laki-laki yang hanya berkisar 48,98%. Berdasarkan pengamatan dari peneliti diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki karena para pemuda khususnya laki-laki yang tidak bersekolah yang ada di Kalurahan Karangawen memilih untuk merantau ke luar Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, selain itu adapun pengaruh keberhasilan program keluarga berencana (KB) yang diterapkan sehingga di beberapa padukuhan kekurangan pemuda yang seharusnya dapat menjadi regenerasi karang taruna baik yang ada di padukuhan maupun kalurahan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak sekolah	312	19,10
2.	Belum tamat SD/MI	130	07,96
3.	Tamat SD /MI	549	33,61
4.	SLTP/ sederajat	316	19,35
5.	SLTA/ sederajat	254	15,55
6.	D-I/D-II	9	00,55
7.	Akademik/Dplm III/ Sarjana Muda	9	00,55
8.	D-IV/ SI	54	03.30
9.	Strata II	0	0
10.	Strata III	0	0
	Jumlah	1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel II.2 dapat diketahui bahwa, tingkat pendidikan di Kalurahan Karangawen didominasi oleh tamatan SD/MI dengan persentase sebesar 33,61% jika dibandingkan dengan D-1/D-11, Akademik/Diploma III/ Sarjana muda yang berbanding terbalik yaitu hanya sekitar 00,55%. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kalurahan Karangawen memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sangat

terbatas, Karangawen hanya memiliki sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD.

Mayoritas masyarakat Karangawen hanya menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah dasar (SD). Fasilitas seperti sarana dan prasarana khususnya pendidikan menjadi komponen penting dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia yang ada, karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masyarakat harus keluar dari Kalurahan Karangawen ke kalurahan lainnya. Namun hanya sedikit masyarakat yang memilih untuk melanjutkan pendidikan baik karena jarak ke fasilitas yang dituju cukup jauh dan bahkan masih ada masyarakat yang memahami tentang pentingnya pendidikan.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Presentase %
1.	Islam	1.182	72,38
2.	Kristen	443	27,12
3.	Katolik	8	00.48
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
6.	Konghucu	0	0
Jumlah		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Karangawen berdasarkan agama didominasi oleh

agama Islam dengan persentase 72,38% dan sisanya beragama Kristen dengan persentase 27,12% serta Katolik dengan persentase 00,48%. Melalui observasi peneliti menemukan bahwa jumlah penduduk yang beragama islam memang lebih banyak dari pada agama lain, namun kalurahan Karangawen memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana ibadah yang sangat memadai baik bagi kaum muslim memiliki 1 masjid serta 5 mushola dan untuk umat kritiani terdapat 2 gereja. Masyarakat sangat menghargai perbedaan yang ada serta dapat menerima dan saling membantu satu sama lain.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian/Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang	Presentase %
1.	Mengurus rumah tangga	123	07,53
2.	Pelajar/mahasiswa	135	08,26
3.	Pensiun	5	00,30
4.	Belum bekerja	236	14,45
5.	ASN	21	01,28
6.	TNI	0	0
7.	POLRI	0	0
8.	Pejabat negara	0	0
9.	Buruh/Tukang berkeahlian khusus	37	02,26
10.	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	803	49,17
11.	Karyawan BUMN/MUMD	3	00,18
12.	Karyawan Swasta	152	09,30
13.	Wiraswasta	92	05,63
14.	Tenaga Medis	3	00,18
15.	Pekerjaan lainnya	23	01,40
Jumlah		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel II.4 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Karangawen sebagian besar bekerja di sektor

pertanian/peternakan/perikanan yakni sebesar 803 orang atau setara dengan 49,17%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pula bahwa banyak penduduk juga tidak memiliki pekerjaan ataupun menganggur yakni sebanyak 236 orang atau setara dengan 14,45%, tentu saja hal ini mengkhawatirkan dan membawa masalah yang besar karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan masalah sosial yakni masalah pencurian, dan lain-lain. Sehingga hal ini menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah Kalurahan Karangawen untuk dapat mengatasi masalah pengangguran diatasi dengan menggerakkan warga melalui pemanfaatan potensi kalurahan misalnya dalam bidang pertanian.

Selanjutnya terdapat 152 orang penduduk atau 09,30% masyarakat Karangawen juga bekerja sebagai karyawan swasta namun mereka memilih keluar dari kalurahan untuk bekerja. Dari semua pekerjaan yang ada ketika dianalisis lebih mendalam bahwasanya sebagian besar masyarakat Kalurahan Karangawen sendiri memilih untuk menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian/peternakan/perikanan yang menjadi potensi unggulan di desa. Hal ini cukup terbukti berdasarkan tabel di atas bahwa banyak masyarakat yang bekerja sebagai pertanian/peternakan/perikanan yakni sebanyak 803 orang atau setara dengan 49,17%.

Peneliti menemukan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di Kalurahan Karangawen relatif lambat sedangkan tingkat pertumbuhan angka kerja itu sangat cepat sehingga menyebabkan masalah pengangguran yang semakin meningkat. Karena hal itu sektor pertanian merupakan sektor

yang paling banyak diminati oleh masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu beberapa masyarakat beralih ke sektor industri pengelolaan dan juga wiraswasta. Dari hal ini masyarakat dapat diberdayakan dalam berbagai bidang berdasarkan potensi yang dimiliki seperti dalam bidang ekonomi yaitu UMKM, Kelompok Wanita Tani Rukun Usaha di Padukuhan Tlasih, dan Kelompok P2WKSS Arjuna yang ada di Padukuhan Pokak. Beberapa kelompok usaha tadi dapat berguna dalam mengatasi permasalahan pekerjaan karena masyarakat diberdayakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa selain itu juga bisa menambah pendapatan asli desa. Potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen ini adalah banyaknya pelaku-pelaku UMKM yang beroperasi. Ada sekitar 40an pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen yang beroperasi di bidang makanan seperti keripik singkong, keripik pisang, dan peyek. Minat yang besar dari pelaku UMKM untuk memajukan bisnisnya dalam bidang makanan sangat tinggi menjadikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen namun fasilitas yang kurang memadai dan juga pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang perlu untuk ditingkatkan.

Sejauh ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti berupa data rincian anggaran pendapatan desa di dapatkan dari bagi hasil BUMKal, hasil pengelolaan tanah kas desa, bagi hasil pajak dan restribusi. Sedangkan UMKM dan usaha lainnya sudah ada namun belum dikelola dengan baik karena beberapa kendala yaitu belum adanya legalitas untuk setiap UMKM

dan juga sistem produksi yang bergantung pada musim dan juga permintaan dari pembeli sehingga tidak setiap hari mereka akan melakukan aktivitas produksi, adapun mental dari para pelaku UMKM dalam persaingan yang masih harus di benahi sehingga mampu untuk konsisten dalam bersaing baik di tingkat kalurahan maupun di tingkat kecamatan. Dan juga belum adanya kelompok UMKM dimana pelaku UMKM masih bersifat individu serta pemasarannya hanya dalam lingkup sekitar pdukuan.

D. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi sekaligus hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan Karangawen masih berjalan baik sampai saat ini. hal ini bisa dilihat dari kehidupan sosial masyarakat yang dimana semangat gotong-royong serta kekerabatan masih tinggi. Seperti halnya kerja bakti rutin yang diadakan dalam 1 minggu, arisan, pengajian, TPA, selain itu kegiatan sosial tidak hanya bicara dalam hal kemasyarakatan namun juga bisa dilihat dalam kebudayaan masyarakat Karangawen yaitu dimana mereka sama-sama membangkitkan, melestarikan, dan mengembangkan budaya dan kesenian yang sudah ada sejak dulu di Kalurahan Karangawen. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kelompok kesenian seperti jathilan, reyog karawitan, gejog lesung dan lain sebagainya. Tidak hanya itu melestarikan kebudayaan juga terlihat dari masih banyaknya acara adat seperti rasulan (bersih dusun), Gumbregan, dan cara adat lahirnya maupun kematian.

E. Potensi Ekonomi

Sektor perekonomian Kalurahan Karangawen terbagi atas beberapa sektor, beberapa sektor yang menjadi mata pencaharian masyarakat dibagi menjadi dua yaitu Kelompok Wanita Tani usaha Padukuhan Tlasih dan kelompok P2WKSS Arjuna Padukuhan Pokak. KWT atau singkatan dari kelompok wanita tani merupakan kelompok tani yang anggotanya perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian dimana KWT sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani sebagai pembangunan pertanian di Padukuhan Tlasih. KWT di Padukuhan Tlasih diberi nama “rukun usaha” yang di dalamnya terdapat 25 anggota KWT, rukun usaha memiliki visi misi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menguatkan dan menambah kegiatan bagi ibu-ibu padukuhan. Sedangkan kelompok PW2KSS merupakan kelompok yang anggotanya perempuan yang melaksanakan usaha di bidang kuliner atau makanan. P2WKSS memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan perempuan khususnya di bidang kuliner. P2WKSS memiliki 15 anggota dengan visi misi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan dan menambah kegiatan perempuan seperti membuat keripik peyek, keripik pisang, keripik ketela, keripik tempe, risol, kue bawang dan lainnya.

F. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Mayoritas masyarakat Kalurahan Karangawen memeluk agama Islam sehingga berdasarkan profil Kalurahan Karangawen tahun 2023

menyatakan bahwa sarana peribadatan di kalurahan ini terdapat 5 yang terdiri dari 1 masjid dan 4 mushola.

Gambar II. 2
Sarana Peribadatan Mushola/Masjid di Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Selain itu Kalurahan Karangawen juga terdapat sarana peribadatan agama lain yaitu Kristen seperti adanya 2 gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Padukuhan Karangawen.

Gambar II. 3
Sarana Peribadatan Gereja di Kalurahan Karangawen



Sumber : Profil kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masyarakat di Kalurahan Karangawen memang didominasi oleh kaum muslim namun rasa toleransi dan menghormati antar umat beragama sangat tinggi, dengan adanya perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Karangawen untuk saling bergotong-royong dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel II. 5
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Gedung	1
2.	TK	2 Gedung	2
3.	SD Bopkri	1 Gedung	1

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel II.5 di atas, dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kalurahan Karangawen tergolong minim hal ini dibuktikan dengan hanya adanya 1 gedung PAUD, 2 gedung TK, dan 1 gedung SD.

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA yang berada di Padukuhan Pokak

Gambar II. 4
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA di
Padukuhan Pokak



Sumber : Profil Kalurahan Karangawen 2023

- b. TK ABA XXI berada di Padukuhan Pokak

Gambar II. 5
TK ABA XXI di Padukuhan Pokak



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

- c. TK ARIWACANA berada di Padukuhan Kepuh

Gambar II.6

Gambar II. 6
TK ARIWACANA di Padukuhan Kepuh



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

d. SD BOPKRI berada di Padukuhan Kepuh

Gambar II. 7
SD BOPKRI di Padukuhan Kepuh



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Kemudian sangat disayangkan bahwa di Kalurahan Karangawen tidak memiliki SMP dan SMA. Sehingga hal ini menjadi problem dikarenakan pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang tersebut harus keluar dari Kalurahan Karangawen untuk melanjutkan pendidikan ke

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas seperti di Kalurahan Jepitu yang tidak jauh dari Kalurahan tersebut.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Kalurahan Karangawen sangat memprihatinkan sekali hal ini dikarenakan tidak adanya sarana kesehatan seperti poliklinik maupun balai pengobatan yang dimana kalau dilihat sarana kesehatan merupakan hal yang sangat krusial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga berangkat dari problem ini dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah desa untuk bisa membangun setidaknya balai pengobatan di Kalurahan Karangawen, agar hal ini masyarakat Karangawen tidak perlu lagi keluar berobat di puskesmas yang berada di Kalurahan Tileng. Peneliti menemukan bahwa Kalurahan Karangawen meskipun tidak memiliki poliklinik namun Karangawen memiliki 1 unit ambulance yang dapat digunakan oleh masyarakat Karangawen.

4. Sarana Perdagangan

Gambar II. 8
Warung Sembako di Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Di Kalurahan Karangawen terdapat sarana perdagangan yang meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan untuk fasilitas di Kalurahan Karangawen terdapat toko pertamini, bengkel, dan warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah.

Gambar II. 9
Usaha Mebel di Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Sedangkan industri produk barang di Kalurahan Karangawen terdapat usaha mebel atau perkakas rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan lainnya. sehingga hal ini dibuktikan juga dengan adanya rumah produksi. Untuk mebel sendiri peneliti menemukan bahwa para pemilik usaha beserta anggotanya memiliki kemampuan dan skill yang sangat baik dalam menjalankan industri tersebut namun kendala terbesar yang dihadapi adalah penjualan produk yang masih dalam lingkup Jawa Tengah dan para pemilik usaha ini mempunyai harapan besar agar pemerintah kalurahan

dapat membantu dalam proses pemasaran atau ekspor ke wilayah lain agar pemasarannya lebih luas lagi.

G. Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan Karangawen

1. Visi dan Misi Kelurahan Karangawen

Visi dan misi Kelurahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah Kelurahan dimana hal ini menjadi arah, peta jalan, serta patokan akan cita-cita ataupun harapan yang ingin dicapai pada periode pemerintahan kalurahan tersebut sehingga adapun visi misi Kelurahan Periode 2022-2027 seperti yang termuat dalam RPJM Kelurahan Karangawen

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah 6 (enam) tahun. Visi pembangunan Jangka Menengah Kelurahan periode 2022-2027, merupakan penjabaran dari Visi Lurah terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis Kelurahan sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kelurahan Karangawen maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2022-2027 adalah: membangun Desa Karangawen dan menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, jujur, adil, berbudaya berakhlak mulia dan berwibawa.

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen pada tahun 2022-2027, yaitu: terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya tepat sasaran. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Menjadikan spiritual roh dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui pemberdayaan BUMDes/BUMKal. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalurahan. Visi Kalurahan Karangawen diselaraskan dengan visi Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: “Gunungkidul Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”.

Keterkaitan Visi Kabupaten dan Visi Kalurahan Karangawen. Visi Kalurahan Karangawen Membangun desa Karangawen dan Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, jujur, adil, berbudaya berakhlak mulia dan berwibawa. Selaras dengan Visi dan

arah pembangunan Lima Tahunan Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 esa.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi Kalurahan. Upaya tersebut sebagai berikut:

- 1) Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yg transparan, jujur adil
 - a) Tujuan: Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam dalam semua aspek Pemerintahan melalui informasi anggaran dan pelaksanaan/pelaporan, tidak ada pembedaan perlakuan kepada masyarakat
 - b) Sasaran: masyarakat, Pemerintah Kalurahan, lembaga Pemerintah Kalurahan dan Lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- 2) Misi 2: Mengedepankan musyawarah mufakat baik dengan pemerintah kalurahan maupun masyarakat.
 - a) Tujuan: kualitas perencanaan, membangun kerjasama tim, keterlibatan dan peran aktif masyarakat, tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan

- b) Sasaran: Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kalurahan, Lembaga kemasyarakatan
- 3) Mengutamakan pelayanan publik yang cepat mudah dan tepat
 - a) Tujuan: Efisiensi waktu dan biaya,
 - b) Sasaran: masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, lintas sektor
- 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kalurahan
 - a) Tujuan: Mampu melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi
 - b) Sasaran: pemerintahan Kalurahan, pamong dan seluruh staf.
- 5) Menanamkan nilai-nilai religius, budaya, kearifan lokal, melalui program pengembangan spiritual dan adat istiadat
 - a) Tujuan: Masyarakat yang berkarakter, berkeTuhanan, membangun budaya gotong royong, berbudaya, tetap menjunjung adat istiadat, Pemenuhan peningkatan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
 - b) Sasaran: masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, memberikan penguatan kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- 6) Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program BUMKAL

- a. Tujuan: meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan PAD,
 - b. Sasaran: terbangunnya jaringan dengan pihak lain, pengorganisasian kelompok, peningkatan SDM, Peralatan yang memadai.
- 7) Menggalang silaturahmi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat
- a) Tujuan: terjalinnya keakraban, komunikasi yang baik, persatuan dan kesatuan masyarakat
 - b) Sasaran: masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

Keselarasan visi misi dan tujuan RPJMD Gunungkidul dan RPJMKal Karangawen. Visi Pembangunan RPJMD Gunungkidul 2021-2026 "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Visi Kalurahan Karangawen tahun 2022-2027 adalah membangun desa Karangawen dan menyelenggarakan pemerintahan yg transparan, jujur, adil, berbudaya berakhlak mulia dan berwibawa.

2. Pembagian Wilayah Kalurahan

Sebagai sebuah Kalurahan yang mempunyai wilayah yang cukup luas yakni 6.252.537 Ha serta penduduk yang lumayan banyak 1633 orang maka wilayah Kalurahan Karangawen pun dibagi dalam beberapa pedukuhan sera Rukun Warga dan Rukun Tetangga seperti tabel dibawah ini :

Tabel II. 6
Pembagian Wilayah Kalurahan

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kepuh	01	01
			02
2.	Bandung	02	03
			04
3.	Tlasih	03	05
			06
4.	Langsep	04	07
			08
5.	Pokak	05	09
			10
			11
			12
6.	Tegalrejo	06	13
			14
7.	Karangawen	07	15
			16
8.	Ngaglik	08	17

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel II.6 di atas, dapat diketahui bahwa Kalurahan Karangawen terbagi atas 8 padukuhan yang di dalam kalurahan tersebut terdiri dari 8 rukun warga dan 17 rukun tetangga. Adapun jumlah rukun tetangga yang paling banyak adalah di Padukuhan Pokak dan yang paling sedikit terdapat di Padukuhan Ngaglik.

3. Struktur Organisasi Pemerintah dan Lembaga Kalurahan Karangawen

a. Struktur Pemerintahan Kalurahan Karangawen

Organisasi pemerintahan Kalurahan merupakan satu kesatuan organisasi yang memiliki legalitas untuk mengelola jalannya pemerintahan di dalam sebuah Kalurahan (desa). Pemerintahan Kalurahan selayaknya eksekutif yang menjalankan fungsi eksekutif dan dibantu oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga

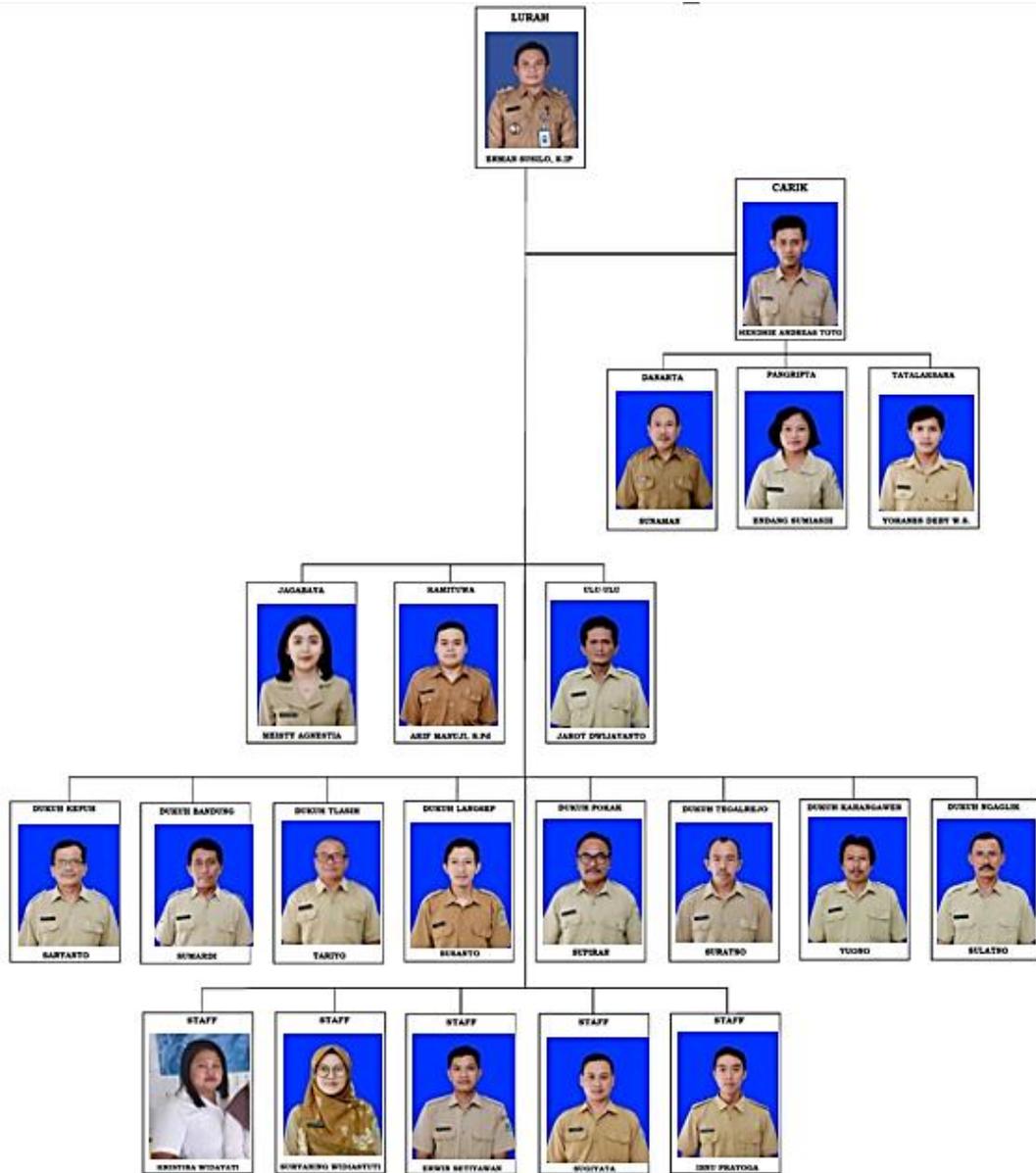
legislatif untuk skala Kalurahan. Dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Yang dimana dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sehingga berdasarkan penjabaran di atas maka akan dipaparkan data personil pemerintah Kalurahan Karangawen dan susunan organisasi pemerintahan Kalurahan Karangawen.

Tabel II. 7
Data Personil Perangkat Kalurahan

Nama	Jabatan	L/P	Agama	Pendidikan	Tanggal Lahir	SK Pengangkatan
ERMAN SUSILO, S.IP	LURAH	L	ISLAM	S1	20 Februari 1983	141/ 160/ PGS/ KPTS/ 2021
HENDHIE ANDREAS TOTO	CARIK	L	ISLAM	SMK	17 Mei 1986	30/KPTS/2020
MEISTY AGNESTIA	JAGABAYA	P	KRISTEN	SMA	15 Juni 1993	51/KPTS/2020
JAROT DWI JAYANTO	ULU-ULU	L	KRISTEN	SMA	11 April 1977	141/10/KPTS/2002
ARIF MANUJI	KAMITUWA	L	ISLAM	S1	01 Juli 1992	31/KPTS/2020
SUNAMAN	KAUR DANARTA	L	KRISTEN	SMA	06 Oktober 1971	141/10/KPTS/2002
YOHANES DEBY WAHYU SAPUTRA	KAUR TATA LAKSANA	L	KRISTEN	SMK	18 Desember 1993	23/KPTS/2016
ENDANG SUMIASIH	KAUR PANGRIPTA	P	KRISTEN	SMK	05 Mei 1979	25/KPTS/2016
SARYANTO	DUKUH	L	KRISTEN	SMA	07 Oktober 1970	141/10/KPTS/1999
SUMARDI	DUKUH	L	KRISTEN	SMK	11 April 1971	17/KPTS/2009
TARIYO	DUKUH	L	ISLAM	SMA	13 Oktober 1965	141/10/KPTS/1999
SUSANTO	DUKUH	L	ISLAM	SMA	23 Agustus 1982	23/KPTS/2016
SUPIRAN	DUKUH	L	ISLAM	SMA	30 Desember 1967	141/10/KPTS/1999
SURATNO	DUKUH	L	KRISTEN	SMA	12 Juli 1967	141/10/KPTS/1999
YUONO	DUKUH	L	ISLAM	SMK	13 Juni 1974	141/10/KPTS/1999
SULATNA	DUKUH	L	KRISTEN	SMP	09 April 1971	141/10/KPTS/1999
ERWIN SETYAWAN	STAFF PAMONG KALURAHAN	L	ISLAM	SMK	10 Januari 1995	23/KPTS/2016
SURYANING WIDIASTUTI	STAFF PAMONG KALURAHAN	P	ISLAM	SMK	12 Agustus 1991	23/KPTS/2016
KRISTINA WIDIYATI	STAFF PAMONG KALURAHAN	P	KRISTEN	SMA	26 Agustus 1985	23/KPTS/2016
SUGYATA	UPAH TETAP KALURAHAN	L	KRISTEN	SMA	20 Januari 1981	33/KPTS/2020
IBNU PRAYOGA	UPAH TETAP KALURAHAN	L	ISLAM	SMK	25 Desember 1995	32/KPTS/2020

Sumber: Data Personal Pemkal Karangawen 2023

Bagan II. 1 Struktur Organisasi Kalurahan Karangawen



Sumber: Data Personal Pemkal Karangawen 2023

Melalui bagan tersebut kita bisa melihat dan tahu tentang tugas, fungsi, dan hubungan kerja dari semua elemen pemerintah Kalurahan yang ada di Kalurahan Karangawen. Dari struktur di atas pula menunjukkan pula bahwa pemerintah Kalurahan Karangawen sudah

membuat serta mengimplementasikan secara baik struktur organisasi kalurahan berdasarkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Perjalanan pemerintahan pada sebuah kalurahan tidak dapat dipisahkan dari peran aktor-aktor penting dalam kalurahan salah satunya adalah lurah desa. Dimana pemerintahan kalurahan sendiri adalah Lurah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Artinya bahwa Lurah Desa tidak berdiri sendiri tetapi juga didukung oleh perangkat-perangkat dibawahnya yang menjadi instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja desa.

Kalurahan Karangawen sendiri memiliki salah satu misi yang sangat baik khususnya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yakni melaksanakan tata kelola pemerintah yang transparan, jujur, dan adil. Untuk mencapai hal tersebut peran pemerintahan Karangawen menjadi suatu hal yang penting yakni bekerja secara profesional dan melayani dengan sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Tetapi disisi lain tidak bisa dipungkiri juga bahwa jalannya pemerintahan perlu adanya kontrol oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan sendiri merupakan lembaga yang merupakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang menjadi wakil bagi masyarakat serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di

Kalurahan yang mana DPKal adalah jembatan sekaligus wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta mengevaluasi terhadap berjalannya proses pemerintahan di Kalurahan.

b. Lembaga Pemerintahan

Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK) Badan Permusyawaratan Kelurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berikut Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kelurahan Karangawen :

- 1) Nanto Riyadi, S.Pd : Ketua
- 2) Sugeng : Wakil Ketua
- 3) Suci Ambarwati : Skretaris
- 4) Sulardi : Ketua Bidang
- 5) Riyadi : Ketua Bidang
- 6) Supardal : Anggota
- 7) Sigit Utomo Putro : Anggota

Karang taruna merupakan wadah bagi para pemuda desa untuk mengembangkan diri, berikut struktur Karang Taruna Karangawen :

- 1) Pembina 1 : Panewu Girisubo
Pembina 2 : Karang Taruna Kapanewon
Pembina 3 : Lurah
- 2) Ketua 1 : Turasno

Ketua 2 : Amuktia Dian Aptinardi

3) Sekretaris 1 : Beti Ruheni

Sekretaris 2 : Fajar Susanto

4) Bendahara 1 : Edi Biyantoro

Bendahara 2 : Fendi Ardiawan

5) Seksi-Seksi:

a. Pendidikan dan Pelatihan: Iwan Hidayat dan Maryanto

b. Kelompok Usaha Kesejahteraan sosial : Iwan Warda dan
Sudayat

c. Kelompok Usaha Bersama: Tinaka Riko Jayanto dan Rasi
Puendra Imam Mahdi

d. Pengembangan kegiatan kerohanian dan pembinaan mental:
Sugiyarto dan Rusmiyanti

e. Pengembangan olahraga dan Seni Budaya: Sigit Haryoko dan
Immanuel Sudrajat

f. Lingkungan hidup: Heri Prabowo dan Aris Rudianto

g. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan: Fetinka Riki
Cahyanto dan Andreas Sutono

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1) Ketua 1 : Dwi Ristiyani

Ketua 2 : Yurita Sugiyanti

2) Sekretaris 1 : Tatik Supraptilah

Sekretaris 2 : Esti Wulandari

Sekretaris 3 : Meisty Agnestia

3) Bendahara 1 : Ratna Hidayati

Bendahara 2 : Endang Sumiasih

Bendahara 3 : Suryaning Widiastuti

4) Kelompok Kerja

Ketua Pokja 1 : Uyung Sudaris Susilawati

Sekretaris Pokja : Cici Ega Saputri

Bendahara Pokja : Supraptini

Anggota Pokja : Isnuryati

Anggota Pokja : Rismiyati

Ketua Pokja 2 : Supiyarsih

Sekretaris Pokja : Sumilah

Bendahara Pokja : Magdalena Rismiyantini

Anggota Pokja : Suharyanti

Anggota Pokja : Jumilah

Ketua Pokja 3 : Supeni

Sekretaris Pokja : Endrawati

Bendahara Pokja : Sugi Lestari

Anggota Pokja : Finda Nurianti

Anggota Pokja : Ernawati

Ketua Pokja 4 : Sumaryati

Sekretaris Pokja : Winaryanti

Bendahara Pokja : Arni Nur Kurniawati

Anggota Pokja : Ismiyati

Anggota Pokja : Nada Apriana

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Kalurahan Karangawen tahun anggaran 2023.

Anggaran pendapatan dan belanja desa kalurahan Karangawen sendiri berbasis SISKEUDES.

Tabel II. 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	Pendapatan	14.000.000,00	
4.2.	Transfer	1.850.893.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.881.643.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	682.873.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan	392.510.315,63	
5.3.	Jasa Belanja	755.876.260,00	
5.4.	Modal		
	Belanja Tidak Terduga	80.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.911.460.495,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.817.195,63)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan		
	Pembiayaan	34.817.195,63	
6.1.1.	SILPA Tahun		
	Sebelumnya	34.817.195,63	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.817.195,63	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber : SISKEUDES Kalurahan Karangawen tahun 2023

Dari tabel II.8 di atas peneliti akan menguraikan mengenai belanja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Belanja yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam beberapa sub bidang pembelanjaan didalamnya yaitu penyelenggaraan belanja desa slitap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan yang terakhir yaitu sub bidang pertahanan.

Dari tabel APBKal di atas dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan terbesar yaitu pada pendapatan transfer sebesar 1.850.893.300,00. Sumber-sumber pendapatan Kalurahan Karangawen terdiri dari 3 (tiga) sumber yang meliputi Pendapatan Asli Kalurahan, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah dan lain-lain pendapatan kalurahan yang sah. Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan kalurahan yang menjadi kapasitas fiskal kalurahan. Sedangkan proporsi terbesar dari belanja

yaitu belanja modal sebesar 755.876.260,00. Belanja Kalurahan menjadi indikator besaran APBKal pada suatu kalurahan, sehingga menjadi cermin kemampuan keuangan suatu desa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan. Semakin besar alokasi belanja kalurahan pada struktur APBKal suatu kalurahan, mencerminkan semakin besarnya kemampuan keuangan suatu kalurahan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan kalurahan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan kalurahan dan belanja kalurahan. Pembiayaan Kalurahan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, pinjaman kalurahan, hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan, penerimaan piutang kalurahan, dan penerimaan kembali penyertaan modal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Kalurahan, dan pembayaran pokok hutang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan eksploratif untuk menggali lebih dalam mengenai objek yang diteliti, peneliti mendapatkan informasi yang sangat berguna dari informan yang sangat beragam dan berasal dari pemerintah kalurahan, organisasi atau lembaga masyarakat maupun masyarakat bisa terkait dengan tiga fokus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan kepala desa atau lurah dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kreativitas perangkat desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan lalu menyimpulkan secara general terkait dengan dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut:

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka peneliti menyatakan bahwa dinamika pelaksanaan karangawen di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di kalurahan Karangawen telah terlaksana walaupun pada realitasnya masih terdapat hambatan, hal ini dibuktikan dengan peneliti melihat dari tiga indikator yaitu kepemimpinan kepala desa atau

lurah dalam dinamika pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kreativitas perangkat desa dalam dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam dinamika pelaksanaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, Kepemimpinan yang dijalankan oleh lurah Karangawen saat ini dengan gaya dan tipe kepemimpinan yang demokratis merubah citra pemerintah Kalurahan yang sebelumnya dipandang buruk oleh masyarakat perlahan berubah dengan cara lurah merangkul dan mengajak masyarakat untuk berkomunikasi. Mempunyai tanggung jawab sebagai lurah tentu saja tidak mudah harus mampu untuk menempatkan diri dan mencoba untuk memahami setiap orang yang ada disekitarnya baik itu perangkat kalurahan maupun masyarakat, sejauh ini lurah karangawen sudah berusaha untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan caranya dan tidak terlepas dari dasar peraturan yang sudah ada, tatakelola pemerintahan juga semaikin baik lurah bersama perangkat kalurahan juga terbuka terhadap masyarakat. Lurah karangawen membuat trobosan-trobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas fisik seperti akses jalan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga membuat rumah budaya agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan kebudayaan di tempat tersebut. Lurah karangawen sejauh ini sangat bertanggung jawab, disiplin dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, Kreativitas perangkat kalurahan Karangawen mengacu pada kinerja perangkat yang masih kurang maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat karena adanya permasalahan di internal perangkat karena adanya perangkat kalurahan yang masih baru dan muda sehingga hal ini membuat keegoisan dari masing-masing perangkat sangat tinggi dan sulit untuk bekerja sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik selain itu. Perangkat kalurahan juga belum memahami tupoksi masing-masing bahkan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa perangkat kalurahan rata-rata menyatakan bahwa perangkat tersebut belum memahami dan menguasai bidangnya sehingga jika dalam hal seperti ini saja tidak dikuasai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik selain ini kurangnya kekompakan dalam internal pemerintah desa. Walaupun melalui pernyataan warga masyarakat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan sudah lumayan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan adanya permasalahan tersebut memunculkan gagasan atau ide baru yang terbentuk melalui musyawarah dan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Karangawen walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal.

Ketiga, Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan warga masyarakat dalam kegiatan ataupun program yang diterapkan baik di setiap padukuhan maupun di tingkat kalurahan. Masyarakat mulai mendapatkan kembali rasa percaya kepada pemerintah kalurahan karena usaha-usaha yang dilakukan

oleh pemerintah kalurahan sejauh ini memberikan hasil yang cukup baik sehingga masyarakat mulai membuka diri untuk setiap kegiatan dan juga penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Menurut hasil penelitian juga tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran diri untuk berpartisipasi baik itu partisipasi politik, sosial dan warga. Partisipasi politik di Kalurahan Karangawen sejauh ini masih sangat baik namun pada partisipasi sosial dan partisipasi warga masih kurang, masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya partisipasi tentu saja akan mengambil bagian dalam proses yang ada namun berbeda dengan masyarakat yang acuh tak acuh akan mengabaikan setiap proses yang ada.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan juga temuan-temuan peneliti dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Karangawen yaitu:

1. Pemerintah Kalurahan perlu mengupayakan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kalurahan Karangawen.
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan Bimtek.
3. Menyelesaikan permasalahan internal pemerintah kalurahan dengan mediasi melalui pengadaan evaluasi yang dibuat secara rutin dan disiplin.

4. Belajar dari pengalaman, perlu adanya pelatihan ataupun pemberdayaan antikorupsi agar dapat mengantisipasi terjadinya korupsi yang merugikan berbagai pihak.
5. Pemerintah Kalurahan harus kompak dan satu visi di bawah kepemimpinan Kepala Desa dan tidak boleh mengedepankan ego masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Perlu ada nya inisiatif dalam bekerja tanpa harus diperintah terlebih dahulu agar pekerjaan tidak menumpuk dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan.
7. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada di desa. Dengan memberdayakan masyarakat melalui setiap pekerjaan yang dilakukan akan semakin mudah ketika kualitas sumber daya manusia sudah memadai, pelatihan juga perlu diberikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap musyawarah.
8. Masyarakat harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kalurahan dengan cara memberikan pelatihan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Vol. 3). (R. KR, Penyunt.) Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Moleong, & L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Cetakan ke 36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- M. S. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kualitatif; untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, & Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

- Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol 3 No 2*, 215-219.
- Asrori. (2014). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri, Vol 6 No 2*, 108.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020, Desember). Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa bagi para kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 2*, 34-36.
- Liow, M. R., Laloma, A., & Pesoth, W. (2015). Peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Malola. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No 31*, 6-8.
- Munir, B. (2001). Dinamika Kelompok: penerapannya dalam laboratorium ilmu perilaku. *Universitas Sriwijaya*, 16.

- Muslim, N., & Nasution, I. (2014). Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA, Vol 2 No 2*, 105.
- Sajangbati, Y. C. (2015, April). Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. *Jurnal elektronik bagian hukum administrasi negara fakultas hukum Unsrat, Vol 3 No 2*, 27.
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No 1*, 28.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik, Vol 4 No 1*, 53-54.
- Sundariani, N. P., & Yasa, I. G. (2022, Desember). Pengaruh potensi desa, lokasi desa, kreativitas kepala desa dan partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 2 No 12*, 1468-1478.
- Syafiie, M.Si., P. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. (Suryani, Penyunt.) Jakarta: PT Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220.
- Yunanto, S. E. (2021). Governabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Volume 2 Nomor 1 Juni 2021*, 15-17.

Peraturan Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6

Sumber Lainnya :

Panduan Penulisan Karya Ilmiah “APMD” Tahun 2021

Data Profil Kalurahan Karangawen

Data Personil PEMKAL Karangawen

RPJMKal 2023

<https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-kreativitas/>

<https://m.brilio.net/wow/dinamika-adalah-pahami-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya-220725q/contoh-dinamika-dalam-kehidupan-sehari-hari.html>

<https://eprints.umm.ac.id/90189/>

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil dokumentasi berupa foto-foto wawancara dengan informan selama penelitian.



Wawancara dengan Lurah Karangawen Erman Susilo S.IP pada tanggal, 18 Maret 2023



Wawancara dengan carik Karangawen Hendhie Andreas Toto pada tanggal, 18 Maret 2023



Wawancara dengan Dukuh Kepala Saryanto pada tanggal, 18 Maret 2023



Wawancara dengan ketua PKK Dwi Ristyanti pada tanggal, 18 Maret 2023



Wawancara dengan warga masyarakat Dayak pada tanggal, 18 Maret 2023



Wawancara dengan warga masyarakat pada tanggal, 18 Maret 2023



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 285/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Karangawen ,Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 15 Maret 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Susana Anita Rosalina Udam
No Mhs : 19520008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Karangawen kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul
Tempat : Kalurahan Karangawen kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Schubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

* PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 138/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Susana Anita Rosalina Udam
Nomor Mahasiswa : 19520008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Karangawen kapanewon Girisubo
Kabupaten Gunung Kidul
b. Sasaran : Dinamika Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan
Karangawen kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung
Kidul
c. Waktu : 15 Maret 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Susana Anita Rosalina udam
 Nomor Mahasiswa : 19520008
 Judul : DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Dosen Pembimbing : B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
 Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
21/04	Buat Proposal lengkap. Revisi Latar Belakang: - tulis sumber ref - tambahkan kondisi Empirik - Plus 50! - Fokus	
7 Desember 2022	Revisi - Judul penelitian - Latar belakang masalah tambahkan kondisi empirik - Rumusan masalah diubah - Fokus dan manfaat penelitian - literatur review uraikan persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini	
18 Januari 2023	- ubah judul penelitian - Rumusan masalah, fokus, tujuan dan manfaat belum konsisten dengan judul - Menguraikan Kebaruan dari penelitian ini dalam literatur sejenis melalui perbandingan penelitian sebelumnya dan penelitian ini	
30 Januari 2023	Membuat latar belakang judul baru	
31 Januari 2023	Penyesuaian isi proposal dengan judul baru dan menggunakan PERMENDAGRI No. 114 tahun 2014	
6 Februari 2023	Ganti judul dan menambahkan konsep kewenangan desa dan partisipasi masyarakat.	
20 Februari 2023	Cek turnitin Proposal penelitian	
8 Maret 2023	ACC Proposal penelitian	

6 April 2023	Revisi BAB II - Perbaiki analisis data pada tabel - Sejarah desa diringkas - tambahkan data Personil Pemerintah Desa, Data Keuangan Desa, Data regulasi Desa, dan Data lembaga Desa Revisi BAB III - Belum kelihatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pertimbangan kutipan wawancara - tambahkan contoh dan bukti - munculkan data dari hasil observasi dan dokumentasi - tambahkan perspektif SG	 
18 April 2023	Revisi BAB II - Tambahkan Data keuangan desa - Tambahkan Data Regulasi desa - Tambahkan Data lembaga desa	
2 Mei 2023	Revisi Intisari Revisi BAB I - Tambahkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya pada literatur review - uraikan apa saja yang di observasi dan berikan contoh - uraikan apa saja yang di dokumentasikan baik itu Perur, Perkal, dll Revisi BAB II - Analisis tabel data keuangan desa Revisi BAB III - Perhatikan kutipan wawancara, belum menyug pada fokus dari 3 analisis kepemimpinan, perangkat dan masyarakat - Bidang Penyelenggaraan belum kelihatan	
19 Mei 2023	Acc Ujian Skripsi	

Mengetahui / Menyetujui
 Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing

B. Hadi Saptanir, M.Pd.